

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada. 2008.
- Amin, Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Surabaya, Batavia Press. 2005.
- Chonuah, Ali Ahmad, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka. 2002.
- Christian, Samuel, *Pedoman Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Benda-benda yang Berada di atasnya*, Jakarta, Media Ilmu. 2008.
- Effendie, Bachtiar, *Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni. 1993.
- _____, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni. 1993.
- Effendy, Rusly, *Teori Hukum*, Ujung Pandang, Hassanudin University Press. 1991.
- Hadiman, Rusmanto, *Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Bandung, Eresco. 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti. 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju. 2003.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah, Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi. 1977.
- Islamy dan Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta, Bina Aksara. 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group. 2016.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung*, Mandar Maju. 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju. 2008.
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung, Alumni. 1985.

_____, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju. 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Warta Perundang-undangan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta, LKBHN Antam, 2003.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya. 1999.

Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Kencana Setiawan. 2010.

Soetami, Siti, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press*, Jakarta. 2007.

Suhadi & Rofi Wasisa, *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*, Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfa Beta. 2005.

Sumardjono, Maria W, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas. 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013.

Tehupeiory, Aartje, *Makna Konsiyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cet. I, Raih Asa Sukses, Jakarta, Penebar Swadaya Grup. 2017.

Ter Haar, Bzn, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Soebakti Poesponoto (penerjemah), Jakarta, Pradnya Parata. 1999.

B. Jurnal & Karya Ilmiah

Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, "Hukum Tanah Adat/Ulayat", *Jurnal Hukum*, Vol. IV No. 01. 2019.

F. X. Arsin Lukman dan Siska Riskiyanti, "Kajian Kewenangan Kepala Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah (Studi Kasus Putusan

No.14/PDT.G/2017/PN.Lht)”, *Jurnal Legal Resoning*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Iswanto, Heny, “Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejon”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXV, No.1, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “implikasi”, <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

Ma'moen, Antje M, “Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksana UUPA Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Madya Bandung”, Disertasi, Bandung, Universitas Padjajaran, 1996.

Muhammad Nadzir & Suwandi, “Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah”, *Jurnal De Facto*, Vol. 4 No. 1, Juli, 2017.

Palit, Richard Cisanto, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. III No. 2, April – Juni, 2015.

Yusrizal, Muhammad, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lain

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor Registrasi 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor Registrasi 37/Pdt.G/2018/PN.Sgt.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Indah, tanggal 30 Maret 2022 petugas Kantor Pertanahan Kutai Timur di bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Wawancara dengan Ibu Ruliyanti, tanggal 08 April 2022 selaku Sekretaris Desa Kantor Desa Swarga Bara.

Wawancara dengan Bapak Osler Manalu, tanggal 31 Maret 2022 selaku Sekretaris Desa Kantor Desa Sangatta Utara.

Wawancara dengan Bapak Dawin, tanggal 08 April 2022 selaku Masyarakat Sangatta Utara.